

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepentingan ekonomi hingga kini menjadi salah satu prioritas atau tujuan utama dalam interaksi internasional, termasuk bagi Indonesia. Terlebih dalam masa pembangunan saat ini, Indonesia semakin memprioritaskan isu ekonomi dan menjadikannya sebagai unsur utama diplomasi luar negeri. Di masa lalu, kepentingan ekonomi tidak selalu menjadi prioritas Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, baik pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional bukanlah arah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang paling terlihat pada masa itu adalah akumulasi kekuatan/militer untuk menjaga stabilitas nasional karena Indonesia baru saja merdeka, serta membatasi investasi asing sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme barat.

Masa Soeharto sang bapak pembangunan nasional, merupakan titik balik kebijakan luar negeri Indonesia, Pemerintah menjadi lebih terbuka terutama dalam bidang ekonomi. Keterbukaan pasar/ekonomi nasional merupakan bentuk upaya rezim untuk memperbaiki perekonomian pasca krisis tahun 1960-an. Pembangunan ekonomi dan swasembada pangan menjadi prioritas utama era kepemimpinan Soeharto (Taufik, dkk., 2015). Hanya saja, karena pengembangan perekonomian dilaksanakan dalam pemerintahan otoriter yang mengabaikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), akhirnya upaya perekonomian yang telah dibangun selama 32

tahun memiliki fondasi yang rapuh dan membawa Indonesia ke jurang kehancuran ekonomi saat krisis moneter menerpa tahun 1997. Dampak inflasi dan krisis moneter akibat kegagalan orde baru tersebut masih bisa dirasakan sampai sekarang.

Di masa kepemimpinan Habibie, Abdurahman Wahid, sampai Megawati Soekarnoputri kebijakan perekonomian yang dirumuskan lebih kepada upaya memulihkan kerusakan fatal akibat krisis Asia 1997. Sementara Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia berupaya melakukan *rebranding* dengan jargon "*thousand friends and zero enemy*" (Panduwinata, 2018). Sayangnya, pada periode ini Indonesia mengalami stagflasi ekonomi. Berbagai upaya pada masa kepresidenan Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhyono, mengindikasikan bahwa ada upaya serius dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia dalam kancah internasional.

Perekonomian Indonesia kembali menarik perhatian dari para pengamat politik dan perekonomian pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Sejumlah perkembangan mengiringi pemerintahan Joko Widodo. Pada tahun 2015 silam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pertama kali diresmikan, dan menandakan awal baru bagi perekonomian negara-negara anggota komunitas ASEAN terutama dalam bidang investasi, pergerakan barang dan jasa. Selain itu, Indonesia juga terpilih menjadi anggota G-20 (Kantor Staf Presiden RI, 2015). Hal ini menandakan terbukanya peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih dalam tingkatan global, dan dalam menghadapi tantangan dari arus perekonomian global.

Publik secara luas mengharapkan Presiden Joko Widodo, mampu memanfaatkan momentum diplomasi ini untuk memperkuat perekonomian negara.

Nawa Cita, atau lebih dikenal sebagai sembilan agenda utama Pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama sangat mengedepankan nilai pembangunan ekonomi dalam agendanya. Empat dari sembilan agenda Nawa Cita merupakan respons pemerintah Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang terus berkembang. Agenda pertama, penguatan identitas maritim yang akhirnya dikenal sebagai *Global Maritime Fulcrum*. Agenda ketiga pembangunan infrastruktur. Agenda keenam peningkatan produktivitas rakyat guna meningkatkan daya saing di pasar internasional. Agenda ketujuh peningkatan peran sektor-sektor domestik strategis. Agenda-agenda tersebut diejawantahkan ke dalam upaya nyata pemerintah, dan terlihat dari peningkatan diplomasi ekonomi pada seluruh aspek hubungan luar negeri Republik Indonesia (RI).

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu dari lima pilar utama pada masa pemerintahan Joko Widodo (Panduwinata, 2018). Respons pembangunan domestik dan penguatan unsur diplomasi ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini dikenal sebagai doktrin Jokowi (Coca, 2016). Doktrin Jokowi sendiri diejawantahkan menjadi dua fokus pembentukan diplomasi ekonomi pemerintah. Pertama pembangunan infrastruktur internal. Kedua, penguatan peran diplomat luar negeri sebagai *salesperson* atau agen pemasaran Indonesia sebagai pasar siap investasi sebagai upaya eksternal (Killian, 2020). Sudah lebih dari enam tahun sejak pembangunan infrastruktur

pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah, dan sebagai hasilnya Indonesia lebih siap dari sebelumnya untuk menerima arus investasi asing yang hendak masuk, serta berkembang di Indonesia.

Fokus pembangunan yang sudah terlihat ada pada sektor infrastruktur perhubungan dengan membangun jalan di perbatasan sepanjang 3,194km; 1,387km jalan tol; 811,89km rel kereta api; 136 pelabuhan; 15 bandara; dan 65 Bandara di seluruh daerah Indonesia 46 (Kantor Staff Presiden, 2020). Kedua, fokus pembangunan eksternal pada diplomasi ekonomi Indonesia adalah dengan memperbanyak negosiasi-negosiasi internasional soal perekonomian. Tercatat hampir semua pembahasan presiden dengan perwakilan negara lain hampir selalu membahas masalah ekonomi, termasuk membahas arus investasi dan perdagangan (Tri, 2020). Indonesia sudah lebih siap untuk menghadapi kenyataan baru dalam interaksi internasional yang kebanyakan mengedepankan isu atau permasalahan ekonomi. Tetapi ada satu permasalahan penting yang masih kurang mendapat perhatian pemerintah dalam membangun *framework* diplomasi ekonomi selama enam tahun ke belakang, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur, penarikan investasi asing, maupun kerja sama ekonomi bisa saja justru menimbulkan kerugian besar atau eksternalisasi dalam jangka panjang apabila tidak memperhatikan masalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi cenderung bersifat destruktif apabila tidak diiringi dengan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan lingkungan di mana ekonomi bergerak dan bertumbuh.

Eksternalitas dalam konteks tersebut adalah permasalahan dalam perekonomian terhadap lingkungan (kerusakan ekologis dalam konteks ekonomis),

terutama terhadap akses makhluk hidup termasuk manusia (secara universal) terhadap pemanfaatan alam (*common goods*) (Helbling, 2010). Oleh sebab itu, alam seharusnya tidak dieksploitasi secara berlebihan karena dapat merusak keseimbangan ekosistem, yang di dalamnya terdapat keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Maka dengan kata lain negara dan aktivitas politik lainnya yang memberikan keleluasaan kepada pengeksploitasi (negara mau pun swasta) dinilai sebagai ancaman terhadap ekosistem. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang pada dasarnya tidak pernah merasa cukup pada apa yang sudah diperoleh (serakah) sehingga menimbulkan sifat destruktif, termasuk dalam bentuk negara (pemerintah) dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan serta memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi.

Dalam banyak kasus di berbagai negara perusakan tersebut dapat diidentifikasi sekaligus diprediksi dari kebijakan pemerintah dan kerusakan fatal terhadap lingkungan (eksternalisasi) akibat dari implementasi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh Afrika Selatan hampir masuk ke masa *zero day* di mana tidak ada lagi air layak konsumsi akibat kegiatan eksploitasi yang tidak dikendalikan dengan kebijakan. Hingga sekarang, masyarakat Afrika Selatan di Johannesburg membatasi konsumsi air bersih karena dijatah oleh pemerintah, dan akibatnya pemerintah Afrika Selatan harus memberikan pengeluaran ekstra dalam upaya manajemen air bersih (Alexander, 2019). Begitu juga apabila memperhatikan belahan dunia lainnya, melihat hutan dan unsur-unsur alam yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu dekat, sementara negara terus mengeksploitasi dan disandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk

menahan sisa-sisa sumber daya agar tidak habis dalam waktu dekat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kegiatan investasi/eksploitasi lingkungan bukan hanya berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan tetapi juga merusak prinsip 'ekonomi' itu sendiri.

Perdebatan klasik antara pembangunan ekonomi dan degradasi sumber daya alam telah diusahakan untuk diselesaikan secara ilmiah, karena keduanya merupakan prioritas masalah nyata yang ada saat ini. Bukan hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mengingat meningkatnya keterbukaan Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo terhadap investasi asing, masalah ini juga harus menjadi perhatian utama. Hanya ada satu solusi untuk masalah tersebut, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksudkan adalah untuk memperdamaikan kepentingan ekonomi (upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia) dengan sumber daya alam yang terbatas, guna menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem di masa kini, terlebih lagi generasi mendatang. Dalam sejarah pembangunan perekonomian di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Tindakan-tindakan yang diambil cenderung bersifat normatif, hanya sebagai bentuk *free pass* supaya negara-negara maju melek investasi hijau, mau berinvestasi di Indonesia. Peran pemerintah seolah mengakomodasi kepentingan alam, namun hasilnya justru membuahkan sebaliknya. Budaya *rent seeking* yang terlalu kuat menjadi salah satu kendala utama dalam permasalahan ini.

Pada upaya pembangunan perekonomian di bawah masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia memiliki peluang besar untuk memulai tindakan yang dapat mencegah eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Prof. Emil Salim yang merupakan salah satu bagian utama arsitektur pembangunan ekonomi Indonesia kala itu merupakan aktivis meleak lingkungan. Prof. Emil Salim juga ikut mengambil bagian dalam perumusan pembangunan berkelanjutan global di bawah *World Comission on Environment and Developmnet* (WCED) dan menghasilkan draf perkawinan ekonomi dan lingkungan, dalam laporan berjudul *Our Common Future* (Arifin, 2001). Hanya saja pembangunan berkelanjutan bagi pemerintah Indonesia hanya menjadi angan-angan, dan tidak ada keseriusan mendalam. Prof. Emil Salim, di bawah tekanan pemerintahan Orde Baru tidak dapat memberikan dampak signifikan dalam merumuskan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan kerangka pembangunan ekonomi masa Orde Baru (Arifin, 2001). Selanjutnya, pada masa reformasi sampai sekarang Indonesia melupakan prioritas tersebut, dan seolah perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan alam. Permasalahan inilah yang seharusnya dipikirkan kembali oleh berbagai aktor penting, seperti perumus kebijakan, masyarakat, dan pemerintah dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan kekuasaan sering terlihat dalam kebijakan pemerintah, terutama mengenai kebijakan ekonomi (dan tentunya hal tersebut perlu membayar harga), dan sayangnya *trade off* yang diambil adalah alam, ekosistem, dan bahkan lingkungan di mana masyarakat tinggal. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memahamai bagaimana diplomasi ekonomi/upaya pemerintah untuk

perekonomian, justru dapat menimbulkan dampak eskternalisasi terhadap lingkungan. Diplomasi ekonomi Indonesia yang teramati cenderung rent seeking sehingga menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan. Diplomasi ekonomi yang dimaksud menurut Profesor Bergeijk terdiri dari tiga komponen utama, yakni: hubungan negara, penggunaan aset negara sebagai daya tawar, dan iklim politik ekonomi domestik maupun internasional. Apabila Indonesia salah memilih negara *counterpart* dalam hubungan dagang, akibatnya bisa fatal, karena kegiatan industri dapat mengabaikan isu lingkungan. Sayangnya, untuk meningkatkan daya tawar, pemerintah saat ini kerap mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya untuk kebutuhan investasi, pemerintah tidak konsisten dengan pengaturan peralihan fungsi lahan dan pertambangan yang mencemari lingkungan. Prinsip *good environmental governance* cenderung diabaikan karena menilai iklim bisnis lebih penting dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Penulis pada penelitian ini berupaya memahami eksternalitas diplomasi ekonomi ini melalui dua studi kasus yakni hutan kelapa sawit PT. Korindo di Papua dan operasi perusahaan tambang PT. Multi Harapan Utama di Kalimantan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan lama menyangkut keseimbangan ekonomi dan alam, yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah secara konsisten, menurut penulis dapat menjadi kehancuran bagi perekonomian itu sendiri. Ketidakseriusan pemerintah untuk mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, teramati dengan dilakukannya diplomasi ekonomi yang hasilnya berdampak destruktif terhadap lingkungan hidup. Kelalaian pemerintah dalam menjalankan diplomasi ekonomi tanpa memperhatikan eksternalisasi yang

ditimbulkan, dapat membawa kehancuran bagi lingkungan, ekosistem, dan alam. Penulis akan menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia yang ditelaah melalui tiga aspek, yaitu: *political influence and relationships, the use of economic assets and relationships, the right political climate and international political economic environment* (Bergeijk, 1994), justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian jangka panjang bagi negara. Guna memperlihatkan bentuk nyata dari dampak diplomasi ekonomi terhadap lingkungan, penulis menelaah dua kasus, yaitu: hutan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erna (Korindo Grup) di Papua dan tambang batu bara PT. Multi Harapan Utama di Kalimantan Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana diplomasi ekonomi dalam sektor investasi batu bara pada studi kasus pertambangan batu bara PT. Multi Harapan Utama dan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erna (Korindo Grup) ditinjau dari deskripsi kerangka diplomasi ekonomi menurut Bergeijk?
2. Bagaimana eksternalitas yang ditimbulkan akibat dari diplomasi ekonomi pada studi kasus investasi pertambangan batu bara PT. Multi Harapan Utama dan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erna (Korindo Grup)?
3. Bagaimana kritik teori politik hijau terhadap diplomasi ekonomi berdasarkan pada studi kasus investasi pertambangan batu bara PT. Multi Harapan Utama dan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erna

(Korindo Grup)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk memahami dampak eksternalitas diplomasi ekonomi Indonesia terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan. Hal tersebut dibahas dengan mendalam melalui dua studi kasus, antara lain: Kebun Kelapa Sawit PT. Korindo di Papua; dan PT. Multi Harapan Utama, perusahaan tambang resmi tunjukan pemerintah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur, penulis mengidentifikasi bagaimana tiga aspek dari diplomasi ekonomi memiliki eksternalitas terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan sumbangsih terhadap para pemikir hijau dan para penulis kritis tentang bagaimana teori politik hijau dapat digunakan di Indonesia. Terlebih para pembaca diharapkan dapat menemukan faedah dari teori politik hijau dan pandangan kritisnya terhadap pemerintah, terlebih dalam era industri saat ini. Studi Hubungan Internasional dapat semakin diperkaya, sehingga bukan hanya berisi kajian yang menyangkut negara dan kepentingannya, tetapi juga kajian tentang kepentingan makhluk hidup bahkan lingkungan yang seutuhnya.

Selanjutnya, diharapkan memberikan kegunaan praktis yaitu pembaca memiliki pandangan lebih terbuka, lebih berani untuk mengemukakan kebenaran meskipun dalam hal tersebut harus mengkritik kebijakan pemerintah. Penulis berharap supaya melalui tulisan ini, para pihak yang terlibat dalam tulisan atau studi kasus dapat memperoleh masukan dan memberikan evaluasi positif, guna kepentingan yang lebih besar, kesejahteraan ekosistem terkhusus lingkungan tempat di mana bangsa Indonesia tinggal. Agar di masa mendatang ketika ditemukan pola perusakan yang sama, pembaca dapat segera melakukan tindakan yang sebagai mestinya untuk mengambil bagian demi melindungi lingkungan bumi pertiwi. Selain itu, penulis berharap melalui tulisan penulis, banyak orang dapat tersadarkan bahwa manusia tidak hidup hanya dengan uang saja, tetapi perlu ada keseimbangan di dalamnya.

Setelah memberikan kegunaan praktis pada para pembaca, penulis mengharapkan tulisan ini dapat berguna dan memberikan dampak terhadap manajemen lingkungan oleh aktor-aktor berwenang, seperti pemerintah daerah, kementerian perhutanan, kementerian pembangunan, dan pemerintah pusat. Sekiranya pemerintah dapat mempertimbangkan bagaimana prinsip diplomasi ekonomi saat ini masih menjadi ancaman terhadap ekosistem dan keberlangsungan hidup secara menyeluruh (tidak hanya manusia). Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nantinya, bersifat holistik (tidak hanya berpihak pada keuntungan ekonomi saja).

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan awal mengenai latar belakang secara singkat mengenai diplomasi ekonomi dan bagaimana kebijakan perekonomian Indonesia mendapat tantangan baru dari pandangan politik hijau. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai keterkaitan tiga prinsip/kerangka dasar dalam diplomasi ekonomi menurut Bergeijk yang selanjutnya menjadi dasar *framework* diplomasi ekonomi dalam tulisan ini secara menyeluruh. Selain itu, bab ini diakhiri dengan memberikan pertanyaan penelitian dan gambaran umum mengenai sistematika penelitian.

Bab II: Kerangka Teori

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berguna sebagai fondasi awal dari penjelasan penulis terkait penelitian yang dilakukan terhadap topik. Terdiri dari bagian kajian pustaka, bagian pendalaman teori dan konsep yang akan digunakan sebagai ‘alat bedah’/kacamata untuk membedah tulisan ini secara tepat. Tujuannya adalah supaya pembaca memperoleh modal untuk dapat memahami bagaimana analisis data dibangun pada bagian selanjutnya. Selain itu, bab ini juga membantu menyalurkan pandangan para pembaca dan penulis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan apa dan bagaimana metode dipakai dalam penelitian ini, selain itu bab ini juga memberikan gambaran bagaimana data penelitian

disajikan dan dikumpulkan. Pada bab ini juga penulis memaparkan metodologi dan pendekatan apa yang digunakan penulis dan menurut penulis paling relevan untuk topik terkait maupun bagi penulis. Khusus dalam bab ini terdapat bagan penelitian mengenai *framework* analisis penulis terkait topik yang di bahas/bagaimana alur pikir penulis dalam meneliti. Kemudian pada akhir bab ini, penulis menjabarkan bagaimana data-data diolah/dikelompokkan, dianalisis, dan disajikan.

Bab IV: Diplomasi Ekonomi (*Commercial Policy, Assets as Bargain*, dan Hukum sebagai Iklim Bisnis)

Bab ini menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi digambarkan di dalam dua studi kasus yang sudah dipilih dan dinilai relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memberikan pemahaman dasar terkait diplomasi ekonomi pada dua masa yang berbeda, yaitu Orde Baru dan masa pasca reformasi. Penulis kemudian pada akhir bab ini memberikan kesimpulan terkait diplomasi ekonomi Indonesia yang dinilai konsisten.

Bab V: Eksternalitas dan Pandangan Kritis

Bab ini berisikan eksternalitas atau dampak dari diplomasi ekonomi/dampak proyek hasil diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam dua studi kasus penulis menjelaskannya sebagai dua buah bagian yang terpisah tetapi dengan satu variable yang sama yaitu kerangka diplomasi ekonomi: *commercial policy*, *assets as bargain*, dan hukum sebagai iklim bisnis serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dengan menggunakan tiga aspek tersebut dalam bab ini,

penulis dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya memberikan kritik dan bagaimana seharusnya negara berada dan bertindak berdasarkan pandangan tersebut.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjadi menjadi bagian penegas sekaligus penutup dan ujung dari lima bab sebelumnya, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan kepada temuan-temuan penelitian dan menyederhanakannya, demi memastikan tujuan dari penulisan dapat terlaksana. Lebih jauh, bab ini juga berisikan saran-saran bersifat normatif-aplikatif tujuannya adalah supaya peneliti-peneliti di masa depan dapat mengembangkan ide dari tulisan ini, dan para pihak berwenang dapat menjadikan hal-hal tersebut dasar dalam mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan, terkhusus diplomasi ekonomi.

